

MAMPU

KITA

KABAR DARI KITA

KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI 3 / 2018 | MEI - JUN

Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Disahkan, Mitra MAMPU Turut Berperan

Sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), telah disahkan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB di Istana Wakil Presiden RI, Selasa (5 Juni 2018) lalu.

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah membentuk Tim Pelaksana, Kelompok Kerja (Pokja), dan Tim

Pakar TPB Tahun 2017-2019. Sejumlah Mitra MAMPU turut serta di dalamnya.

Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K. Susilo menjadi anggota Tim Pelaksana, dan Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo sebagai anggota Pokja Pilar Hukum dan Tata Kelola. Sementara itu, sejumlah Mitra MAMPU lainnya menjadi anggota Sub Pokja untuk sejumlah tujuan dalam TPB.

Partisipasi Mitra MAMPU dalam RAN TPB

Tim Pelaksana: Zumrotin K. Susilo (anggota) 

Pokja Pilar Hukum dan Tata Kelola: Sugeng Bahagijo 

Anggota Sub-Pokja:



Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)



Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K)



International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)



'Aisyiyah



Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU)



Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW)



Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan



Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)



Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)



Trade Union Rights Centre (TURC)



Migrant CARE



Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI)



Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)



Forum Pengada Layanan (FPL)



Submitra FPL - LBH APIK Jakarta



Submitra FPL - LRC KJHAM



Submitra FPL - Yayasan GASIRA Maluku

Menjadi anggota dalam Sub Pokja untuk TPB Berikut:



DESBUMI Pringgarata, Wujud Perlindungan Pekerja Migran di Lombok Tengah

Satu lagi Desa Peduli Pekerja Migran (DESBUMI) hadir di Kab. Lombok Tengah. Kamis (3 Mei 2018) lalu, DESBUMI resmi diluncurkan di Desa Pringgarata, salah satu desa pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia (Data: Migrant Care). Dengan demikian, kini terdapat empat DESBUMI di Kab. Lombok Tengah. Tiga lainnya terdapat di Desa Nyerot, Desa Gerunung, dan Desa Darek, sudah beroperasi sejak tahun 2013.

“DESBUMI adalah solusi mengatasi persoalan yang dihadapi buruh migran sebelum, selama, dan sesudah keberangkatan. Di Desa Pringgarata, DESBUMI didukung Peraturan Desa (Perdes) No. 4/2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,” jelas Zahratun dari Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram.

Pernyataan Zahratun turut diamini Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pringgarata, H. Aminullah. Mengingat pentingnya pekerja migran bagi desa, implementasi Peraturan Daerah (Perda) dan Perdes adalah kunci untuk melindungi pekerja migran, termasuk perempuan pekerja migran, dan keluarga mereka. Baik Perda maupun Perdes berperan penting dalam mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).



Zahratun, Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Mataram.

Reses Partisipatif dengan Penyandang Disabilitas



Pada 29 Mei 2018, di kecamatan Gamping, Sleman DI. Yogyakarta, diselenggarakan reses partisipatif Anggota DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda, S.T bersama Komunitas Penyandang Disabilitas Kecamatan Gamping, Sleman dengan dukungan mitra MAMPU, CIQAL. Reses Partisipatif adalah salah satu cara mitra MAMPU membangun kerja sama dengan anggota Parlemen DPRD agar kebutuhan perempuan dan kaum marjinal lainnya masuk pada program kerja dan anggaran daerah.

Reses Partisipatif di Sleman dengan Komunitas Penyandang Disabilitas ini bertujuan untuk mendekatkan komunitas penyandang disabilitas dengan pembuat kebijakan untuk menggali masalah dan kebutuhan Penyandang Disabilitas (perempuan) dan keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas sebagai sebuah mekanisme, untuk penyusunan program pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas (perempuan) dan keluarganya di Kab. Sleman.

Dari reses tersebut ditemukan 3 permasalahan utama penyandang disabilitas dalam sosial, pendidikan dan

ekonomi. Di bidang sosial, penyandang disabilitas sering mengalami perundungan (*bully*), kekerasan dan dikucilkan di masyarakat karena dianggap mengganggu. Ini mempersulit keluarga dengan anggota keluarga disabilitas untuk menjalin dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Dalam bidang pendidikan, umumnya keluarga tidak mengetahui pendidikan setelah Sekolah Luar Biasa (SLB) bagi anggota keluarga penyandang disabilitas. Jika ada, sarana prasarana SLB sudah banyak yang tidak memadai untuk dipakai para penyandang disabilitas. Terakhir di bidang ekonomi, rendahnya keterampilan, pendidikan dan akses ke modal bagi para penyandang disabilitas mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan mereka dan sulit keluar dari keadaan tersebut.

Ada catatan beberapa solusi dari 3 permasalahan tersebut, yaitu sosialisasi isu disabilitas ke masyarakat, pertemuan rutin keluarga dengan disabilitas, jaminan kesehatan khusus disabilitas, penyediaan anggaran bagi perbaikan sarana & prasarana SLB, meningkatkan akses ke pinjaman modal usaha, peningkatan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas.

Hasil diskusi dan kesimpulannya kemudian dirangkum dalam dokumen yang menjadi referensi valid bagi anggota parlemen dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran di wilayahnya. Anggota parlemen Gustan Ganda berjanji bahwa dalam perencanaan pembangunan akan memasukan usulan tersebut dalam program dan anggaran daerah Kabupaten Sleman.



Peluncuran Sekolah Perempuan Wilayah Replikasi Kabupaten Gresik



Peresmian Sekolah Perempuan dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Gresik, KAPAL Perempuan, serta para anggota Sekolah Perempuan.

Dalam rangka peringatan Hari Kartini di bulan April 2018, Kabupaten Gresik resmi meluncurkan Sekolah Perempuan di 10 desa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sekolah Perempuan ini merupakan replikasi dari 4 Sekolah Perempuan yang sudah dinisiasi KAPAL Perempuan di tahun 2014 didukung oleh Program MAMPU. Pembentukan Sekolah Perempuan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan di desa.

Proses ini berjalan sejak tahun 2014, sejak awal pembentukan 4 Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik, pemerintah terus memantau dan melihat keberhasilan Sekolah Perempuan untuk membentuk kepemimpinan perempuan di wilayahnya. Pemerintah melihat perempuan di wilayahnya dapat mendata dan memantau program-program perlindungan sosial pemerintah, mengenali kebutuhan perempuan & warga miskin serta mampu menyuarakannya di dalam forum-forum pengambilan keputusan seperti Musrenbang.

Oleh karena itu sejak tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Gresik sudah mengalokasikan APBD untuk mendukung pembentukan replikasi Sekolah Perempuan di 10 desa di Kabupaten Gresik. Rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan diantaranya sosialisasi tentang Sekolah Perempuan dan

rencana replikasinya ke pemerintah desa/kelurahan calon wilayah replikasi dan OPD terkait, pelatihan kepemimpinan perempuan untuk fasilitator komunitas di 10 desa replikasi, serta mempelajari proses evaluasi kegiatan belajar mengajar dalam Sekolah Perempuan. Semua dilakukan untuk membangun komitmen bersama untuk melaksanakan Sekolah Perempuan.

Saat ini anggota Sekolah Perempuan berjumlah 300 perempuan miskin dengan 20 orang fasilitator komunitas, tersebar di 10 desa wilayah replikasi. Di 10 wilayah tersebut juga sudah teridentifikasi masalah-masalah perempuan di masing-masing desa, antara lain tingginya angka pernikahan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan tingkat kematian ibu, serta rendahnya upah pekerja perempuan, kepemilikan dokumen legal dan keikutsertaan perempuan dalam program perlindungan sosial pemerintah, kesadaran tentang kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan perempuan. Komitmen Pemerintah Gresik untuk menyelesaikan isu-isu perempuan ini kemudian tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2016-2021. Kerja sama multipihak ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan pada khususnya dan masyarakat Gresik pada umumnya.

Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia Resmi Berdiri pada Mei 2018



Perwakilan organisasi/serikat perempuan pekerja rumahan dari tujuh provinsi yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur secara resmi mendirikan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia pada 10 Mei 2018 dengan ketua terpilih Lisna Nasution dari Serikat Pekerja Rumahan Sejahtera Sumatera Utara. Pendirian Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia (JPRI) ini merupakan hasil konsolidasi nasional selama tiga hari dari 8 – 10 Mei 2018 di Medan yang difasilitasi oleh BITRA (Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia), MWPRI (Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia), TURC (Trade Union Rights Centre), dan Yasanti (Yayasan Annisa Swasti), serta didukung sepenuhnya oleh Program MAMPU.

JPRI didirikan dengan dua tujuan utama, yakni: 1) Menjadikan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia sebagai cikal bakal serikat pekerja rumahan untuk mempersatukan seluruh

pekerja rumahan di Indonesia; dan 2) Menjadikan Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia sebagai wadah dan alat perjuangan pengakuan keberadaan pekerja rumahan se-Indonesia melalui kebijakan perlindungan pekerja rumahan.

Beberapa agenda kerja awal yang telah disepakati JPRI adalah melaksanakan pertemuan konsolidasi dua kali setahun, menjadi organisasi berbentuk serikat dalam jangka waktu 1 – 2 tahun, serta mengupayakan lahirnya kebijakan perlindungan bagi pekerja rumahan. Dalam melaksanakan agenda kerja tersebut, JPRI menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat sipil yang telah mengawal pendirian JPRI terutama sekali untuk melanjutkan peningkatan kapasitas anggota JPRI, advokasi kebijakan, pembukaan akses kepada jaringan, aktor maupun institusi strategis, transformasi dan pengelolaan pengetahuan, serta dukungan sumber daya.

Walang Perempuan Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Adat di Ambon

"Perempuan punya pilihan. Apabila diberi ruang dan kepercayaan, dia akan mempersembahkan yang terbaik bagi negerinya," ungkap Enggelina Fitone Angkotamony, Sekretaris Saniri Negeri (Desa) Hukurila, Kota Ambon, Maluku. Partisipasi aktif perempuan yang akrab disapa Mama Nona ini dalam Saniri, sebutan bagi badan pemerintahan adat di tingkat desa, kini dimungkinkan berkat kerja Yayasan Walang Perempuan.

Bermitra dengan Program MAMPU sejak tahun 2015 hingga Juni 2018 sebagai salah satu penerima dana hibah inovasi, Walang Perempuan mendorong penguatan kapasitas dan peran perempuan adat melalui penguatan institusi negeri adat. Selain di Negeri Hukurila, program juga berjalan di Negeri Laihari, Hatalai, Kilang, dan Latuhalat. Hasilnya, para tetua adat di kelima negeri dampingan mengalami perubahan cara pandang terhadap penerapan aturan adat, dan perempuan adat menjadi lebih percaya diri untuk berpartisipasi aktif dalam lembaga-lembaga di tingkat negeri.

Capaian Yayasan Walang Perempuan



Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Saniri di Negeri Hukurila, Hatalai, dan Kilang.



Pembuatan modul pelatihan penyusunan RPJM, yang kemudian digunakan oleh Pemerintah Kota Ambon untuk pelatihan di 25 desa lainnya.



Terbitnya Peraturan Negeri dan turunannya, yaitu Peraturan Raja, yang mengatur sistem pemilihan Saniri Negeri dan partisipasi perempuan di dalamnya, di 5 negeri dampingan.



Berdirinya Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) di 5 negeri dampingan.



Terbitnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKPD) Negeri di 5 negeri dampingan, dokumen perencanaan di tingkat negeri pertama di Kota Ambon.



Terbentuknya Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang aktif melibatkan perempuan di 5 negeri dampingan.

Latihan Beradvokasi melalui Media Sosial

Mitra-mitra MAMPU belajar membuat video blog membahas pentingnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ini adalah bagian dari Pelatihan Advokasi Kebijakan Melalui Media Sosial untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan di Bogor, 21-24 Mei 2018. Pelatihan ini bertujuan agar mitra MAMPU memiliki pengetahuan dasar & kemampuan teknis dalam berkampanye melalui media sosial.

"Materi pelatihan ini cocok untuk mitra MAMPU. Sesuai dengan model kampanye tema Kekerasan terhadap Perempuan yang fokus di media sosial. Selain itu, mentoring selama sebulan sangat membantu. Kami merasa percaya diri menjalankan semua rencana kampanye yang kami buat." – Lenynda Tombok (BaKTI).



Salah satu kelompok peserta berlatih membuat vlog sebagai media advokasi.

Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter: @ProgramMAMPU
Email: info@mampu.or.id

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan